FACHRY ALI • R.J. LINO

Antara Pasar dan Politik

BUMN di Bawah Dahlan Iskan

Antara Pasar dan Politik

BUMN di Bawah Dahlan Iskan

Antara Pasar dan Politik

BUMN di Bawah Dahlan Iskan

FACHRY ALI • R.J. LINO

Jakarta:
KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
Bekerja Sama dengan Lspeu Indonesia

Untuk M. Dawam Rahardjo dan Widigdo Sukarman
yang telah mengajarkan ilmu ekonomi dan financial game.

Daftar isi

Pengantar

BUKU ini—yang merupakan hasil studi atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitannya dengan corak atau gaya kepemimpinan Dahlan Iskan, sebagai Menteri BUMN—adalah hasil karya "dua anak Ragunan". Kedua penulis karya ini memang telah berteman sejak pertengahan 1960-an hingga awal 1970-an. Pada pertengahan 1960-an itu, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI), kini Polisi Republik Indonesia (Polri), membangun kompleks perumahan di Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejak itu, daerah pinggiran Jakarta yang secara infrastruktur terisolasi tersebut, mulai memperlihatkan tanda dinamika tak berpreseden.

Bagaimana perkembangan kawasan itu tidak terlalu relevan disimak di sini.[1] Apa yang, secara subjektif, kami anggap penting adalah lapangan sepak bola kompleks AKRI: sarana yang mewadahi pertemuan kami berdua—melalui pertandingan "anak kompleks" melawan "anak kampung". Di sini, R. J. Lino (yang dikenal dengan panggilan

---

1 Untuk sekadar catatan tentang ini, lihat Fachry Ali, "Ragunan Apa Kabar?: Potret Mini Pergeseran Kultur Santri", *Kompas*, 28 April 1981.

Manneke) mewakili "anak kompleks" dan Fachry Ali mewakili "anak kampung". Dalam sebuah pertandingan, Fachry Ali berusaha menendang bola sekeras-kerasnya. Akan tetapi, kaki yang terayun cepat itu tidak bersentuhan dengan bola, melainkan telapak kaki R. J. Lino alias Manneke. Karena semua bermain dengan telanjang kaki dan kuku kaki Fachry Ali yang tidak dipotong, perbenturan itu membuat telapak kaki Manneke berdarah. Dengan cepat, Fachry Ali meminta maaf dan Manneke memberi respons dengan kalimat yang hingga kini kami ingat: "Enggak apa-apa."

Pertandingan bola dilanjutkan dengan adu kuat di lapangan tenis meja. Ini terjadi karena "anak-anak kampung", yang tidak mempunyai sarana rekreasi, memanfaatkan secara maksimal fasilitas olahraga "anak-anak kompleks". Walau kini Manneke harus mengakui keunggulan pukulan *spin*, *chop*, dan smes Fachry Ali, tidak ada "catatan sejarah" siapa unggul di atas tenis meja di antara kami berdua pada pertengahan dan akhir 1960-an itu. Yang jelas adalah tingginya frekuensi permainan tenis meja tersebut telah membuat kenangan masa kanak-kanak antara kami berdua terpatri.

Pada awal 1970-an, ketika kedua penulis buku ini menginjak masa remaja, frekuensi pertemuan kian menurun. Perbedaan komunitas serta pendidikan di antara kami berdua telah menghapuskan alasan untuk terus bersama. Baru ketika abad berganti, tepatnya, Mei 2010, kami bertemu kembali dalam ajang BUMN. Semenjak 2006, Menteri BUMN Sugiharto (2004-2007) menunjuk Fachry Ali menjadi Ketua Komite Kebijakan Publik (KKP) Kementerian BUMN. Dan dalam sebuah acara KKP bersama dengan Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar (2009-2011), R. J. Lino alias Manneke—yang telah menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo 2—datang menyapa. Maka, kenangan sepak bola dengan telapak kaki berdarah serta warna hijau meja ping pong di masa remaja abad lalu itu kembali tersegarkan.

Dalam posisi yang kini tidak lagi berada dalam "masa remaja" ini, frekuensi pertemuan kian tinggi. Forum-forum KKP memberikan alasan kuat untuk pertemuan tersebut. Dan, tentu saja, tema pembicaraan beralih kepada posisi, peranannya di dalam perekonomian serta kebijakan-kebijakan publik yang ideal bagi kemajuan BUMN. Tingginya frekuensi pertemuan tersebut membuat keduanya membagi

pandangan yang sama tentang BUMN. Karena itu, pemaduan visi menjadi relatif lebih mudah untuk direkonstruksikan dalam wujud sebuah naskah tertulis. Pelatuk pendorong karya bersama ini diperoleh dengan munculnya kepemimpinan Dahlan Iskan, sejak 2011, atas BUMN yang fenomenal.

Mengapa fenomenal? Karena kepemimpinan Dahlan Iskan melahirkan sesuatu yang "menantang" untuk direkonstruksikan secara akademis. Yaitu, interaksi yang dinamis antara corak kepemimpinan Dahlan Iskan—seorang tokoh berlatarbelakang "swasta" dan bertekad melaksanakan reformasi dengan cara yang demonstratif—sejarah dan tradisi kerja BUMN, dan dunia politik. Sebuah hubungan "segi tiga" yang dinamis di atas *setting* atau dengan latarbelakang *the embedded economy*.

BUMN, di satu pihak, mempunyai sejarah yang panjang, memiliki budaya dan tradisi tersendiri yang lekat dengan politik dan negara. Karena itu, walau berwujud korporasi, sosok kinerja BUMN bercampur baur dengan budaya dan tradisi yang berlaku di dalam dunia birokrasi pemerintah atau negara. Tradisi dan budaya BUMN yang relatif berbagi dengan birokrasi ini membawa konsekuensi politik secara langsung. Ini terjadi karena secara konseptual dan perundang-undangan, BUMN termasuk ke dalam *the embedded economy*. Sebagaimana akan dibahas dalam Bab Tujuh di bawah, *the embedded economy* adalah pandangan yang memperlakukan ekonomi hanyalah salah satu fungsi di antara fungsi-fungsi non-ekonomi di dalam masyarakat. Dalam arti kata lain, fungsi ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dengan masyarakat dan, dalam konteks studi ini, politik. Karena itu, BUMN bukan saja berpotensi terperlakukan sebagai "alat" oleh negara (untuk mencapai tujuan-tujuan non-ekonomi), melainkan juga korporasi ini hampir secara substansial, dan di dalam praktik nyata, adalah proyeksi subjektif negara dalam bidang ekonomi.

Untuk memperluas cakrawala pemahaman tentang BUMN sebagai bagian tak terpisahkan di dalam wilayah *the embedded economy*, kami bukan saja menyajikan sejarah dan perbandingan perkembangan BUMN di tiga negara lainnya, yaitu Cina, Malaysia, dan Singapura (sebagaimana terlihat di dalam Bab Tiga), di samping Indonesia sendiri (Bab Empat), melainkan juga sejarah pertarungan gagasan eko-

nomi pada tingkat global. Bagian ini kami anggap penting untuk diajukan. Di satu pihak, untuk memahami *setting* di mana negara memproyeksikan subjektivismenya atas kebijakan ekonomi dan, lebih khusus, BUMN. Di lain pihak, untuk menggambarkan bagaimana secara struktural negara harus bertindak sebagai aktor, yang mendorongnya bernegosiasi dengan ide-ide dan aktor-aktor ekonomi yang dominan pada tingkat global. Dalam usaha negara mempertahankan eksistensinya, ujung dari proses negosiasi tersebut membuahkan semacam kompromi. Yakni, sebagaimana diuraikan dalam Bab Enam, sebuah struktur hubungan *mercatocracy*. Dalam pengertian sederhana, *mercatrocracy* adalah sebuah *business rule of the game* (aturan permainan bisnis) yang mengintegrasikan aspek-aspek legal domestik dan global—hasil kompromi antara aktor-aktor global dan domestik. Dalam konteks BUMN, kompromi ini terlihat pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mengakomodasi semangat "pasar"—sebagaimana yang dikehendaki aktor-aktor global—dan *the embedded economy*, sebagaimana dituntut pejabat-pejabat negara pada tingkat lokal.

Dalam posisi berada di wilayah *the embedded economy*, maka secara struktural BUMN berada di bawah radar kontrol aktor-aktor ekstra-pasar (*extramarket*). Yaitu kaum birokrat dan, terlebih, para politisi yang menjadi anggota parlemen. Secara konstitusional, selain membuat dan mengesahkan undang-undang, parlemen juga mempunyai fungsi ekonomi dan pengawas proses penyelenggaraan negara sekaligus. Dan karena BUMN adalah bagian dari negara, maka dengan sendirinya lembaga politik ini juga berhak mengawasi kinerja Kementerian BUMN dan BUMN itu sendiri. Keterikatan resmi dalam jaringan pengawasan parlemen ini semakin memperkukuh asumsi bahwa BUMN adalah bagian tak terpisahkan dari *the embedded economy*.

Sebagai Menteri BUMN, dan pernah menjabat Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), maka Dahlan Iskan adalah juga bagian dari *the embedded economy* itu. Akan tetapi, seperti diuraikan dalam Bab Dua, karena sejatinya Dahlan adalah seorang *private entrepreneur* ("pengusaha swasta"), maka sedikit banyak latarbelakang itu mempengaruhi pandangan dan kebijakannya di dalam memimpin Kementerian BUMN. Kebijakan-kebijakan itu, dalam

konteks *private corporation* (perusahaan swasta) adalah—sebagaimana akan kita lihat dalam Bab Lima—inovasi kewirausahaan. Akan tetapi, karena "berselera" swasta maka kebijakan-kebijakan tersebut dilihat sebagai sesuatu yang berada di luar tradisi *the embedded economy*. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya dinamika "yang tak biasa" ketika Dahlan, sebagai Menteri BUMN, berinteraksi dengan aktor-aktor lain di dalam dunia *the embedded economy*. Sifat pribadinya yang lebih menunjukkan seorang *iconoclast*, yaitu seseorang yang cenderung menentang hal-hal bersifat prosedural formal/resmi dan secara demonstratif "melempar" hampir seluruh *paraphernalia* (atribut dan tanda-tanda) jabatan seorang menteri, telah menambah bumbu dinamika dalam struktur hubungan Dahlan dengan pihak-pihak berwewenang di wilayah *the embedded economy* ini.

Maka, studi ini pada esensinya adalah sebuah penggambaran interaksi dan dinamika unik—yang dilahirkannya—antara tiga pihak di dalam dunia atau wilayah *the embedded economy*. Kendatipun berada dalam dunia yang sama, perbedaan watak dan latarbelakang ketiga pihak "yang berinteraksi" ini telah melahirkan perkembangan-perkembangan tertentu dan—secara sosial-politik serta bahkan budaya—menarik disimak sebagai "pembelajaran" tentang kebijakan publik di Indonesia. Konteks "pembelajaran" ini perlu ditekankan, karena *public event* (peristiwa yang mengundang perhatian khalayak luas) ini tidak berpreseden. Sebab, sepanjang sejarah, *public event* ini secara telak mendemonstrasikan tarik-menarik antara kecenderungan "pasar" dan "politik" dalam kebijakan BUMN.

Akhirnya, harus dinyatakan di sini bahwa dalam penyusunan karya ini kami berutang kepada berbagai pihak. Karena banyaknya, tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Dalam hal ini, Tanri Abeng patut kami kenang. Di masa Tanri Abeng menjabat Menteri BUMN (1998-1999) inilah KKP—yang dianggotai oleh Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono [Presiden Republik Indonesia, 2004-2009 dan kini 2009-2014], Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X, Kwik Kian Wie, Nurcholish Madjid, Anwar Nasution, Ekcy Sjachruddin, Pande Radja Silalahi, Didik J. Rachbini, Burhamzah, Usman Pelly, Dja'far Assegaf, Tjuk Kasturi Sukiadi, Bambang Sudibyo, Sugeng Sarjadi, dan Fachry Ali—didirikan. Sugiharto, Menteri BUMN 2004-2007, telah

meletakkan jasa besar dengan menghidupkan kembali lembaga KKP. Selanjutnya, secara berturut-turut Sofyan Djalil dan Mustafa Abu Bakar, masing-masing Menteri BUMN pada 2007-2009 dan 2009-2001, turut secara signifikan memanfaatkan aktivitas KKP. Sofyan Djalil bahkan adalah penggagas pendirian KKP ketika menjabat staf khusus Menteri BUMN Tanri Abeng pada 1998. Melalui keanggotaan dalam KKP inilah pengetahuan salah satu penulis karya ini (Fachry Ali) tentang BUMN terakumulasi.

Delapan tokoh Kementerian BUMN harus juga kami sebut di sini: I Nyoman Tjager dan Muhammad Said Didu, keduanya Sekretaris Kementerian BUMN 1999-2000 dan 2005-2010, Mahmuddin Yasin, Deputi Bidang Privatisasi, 2004-2011 [kini, Wakil Menteri BUMN], Sahala Lumban Gaol, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Kebijakan Publik sejak 2010, Agus Pakpahan, Deputi Bidang Agro Industri, 2004-2010, Megananda Darjono, Deputi Bidang Agroindustri, 2010-2012, Achiran Pandu Djajanto, kini, Deputi Bidang Korporasi dan Privatisasi dan Harry Susetyo, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik, 2004-2010 dan Sumaryanto, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik. Dalam kedudukan masing-masing, kedelapan tokoh ini telah memberikan kesempatan luas dalam mendiskusikan peranan dan perkembangan BUMN kepada penulis.

Anggota KKP 2006-2011 (Widigdo Sukarman, Adityawarman, Mas Achmad Daniri, Umar Juoro, Revrisond Baswir, Sutanto Soehodo, Muhammad Fadhil Hasan, Budi Setiawan, Ismed Hasan Putro dan Herman Hidayat serta Teuku Syahrul Ansari), patut mendapatkan penghargaan kami. Diskusi-diskusi yang berlangsung dalam rapat-rapat dan acara-acara KKP sepanjang kurun itu telah menambah khasanah pengetahuan penulis atas dunia BUMN. Bersamaan dengan itu, kami patut mengucapkan terimakasih kepada pihak lainnya dari Kementerian BUMN, terutama Abdul Aziz, Faisal Halimi, Nukman Sangaji, Hambra, Sri Bagus Guritno, Diah Triana, Eko Julianto, Yanto, Samsu Widiarto, dan Herry Dani Lubis. Apresiasi kami sampaikan kepada Dadang Kodri (mantan Direktur Utama PT Pusri), I Ketut Mardjana (Direktur Utama PT Pos Indonesia, Dwi Soetjipto (Direktur Utama PT Semen Gresik), Sofyan Basir (Direktur Utama PT BRI), Adityawarman (Direktur Utama PT Jasa Marga), Arifin Tasrif

(Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding), Hidayat Nyakman (Direktur Utama PT Petro Kimia Gresik), Wachid Usman (mantan Direktur Utama PT Timah Tbk), Eko Sunarko (Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda), Iskandar (Direktur Utama PTPN VI), Fauzi Jusuf (Direktur Utama PTPN V), Aas Asikan Idat (Direktur Utama PT Pupuk Kaltim), Cipto Pramono (Direksi PT Pelindo 2), Bowo Kuntohadi (mantan direksi PT Pusri), Djafaruddin Lexy (direksi PT Pupuk Indonesia Holding), Achmad Tossin (mantan Direktur Utama PT Pupuk Kujang), Ade Suryanti (direksi PT Pupuk Kujang), Endad Rahmat (mantan direksi PT Pos Indonesia), Idih R. Ruskanda (mantan Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kujang), Sudar Wirataatmadja (mantan Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kujang), Harry Hartelan (Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kujang), Ketut Darmawan (direksi Pembangunan Perumahan), Mohammad Toha Fauzi (staf Pembangunan Perumahan), Ujang Somantri dan Tuwuh Wiedodo (PT Pos Indonesia), karena kesediaan mereka bekerja sama dengan KKP serta bercengkrama tentang segi-segi BUMN dengan kedua penulis.

Terimakasih juga kami tujukan kepada Imam Ahmad, Susi Hamilah, Nuryani Supriyadi, Kholid Novianto, Ahmad Fadillah dan Martono Halim Pohan (dari Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha [Lspeu *Indonesia*]), serta Yohannes Situmeyang dari PT Pelindo 2. Jika keenam pertama karena bantuan mereka dalam menyajikan data yang kami butuhkan, maka yang terakhir berjasa mengatur jadwal diskusi antara kami berdua. Seorang kiai, tetapi juga insinyur, tidak boleh kami lupakan dalam penulisan karya ini: Mir'atul Mukminin (dipanggil Gus Amik), pemimpin Pesantren Sabilil Muttaqien, Takeran, Magetan, Jawa Timur. Tokoh yang pernah menjabat Wakil Bupati dan Bupati Kabupaten Magetan ini banyak memberikan informasi tentang Dahlan Iskan di masa kanak-kanak.

Dua tokoh muda, Teuku Taufiqulhadi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Hidayat, secara tidak langsung, memberikan konstribusi tertentu bagi penyelesaian karya ini. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih. Apresiasi kami sampaikan kepada Widigdo Sukarman yang telah bersedia membaca dan memberikan komentar atas naskah buku ini.

Akhirnya, kepada dua perempuan hebat, Siti Nurrahmah dan Betty Sastra, tak boleh luput dari apresiasi kami. Keduanya telah memberi kami semangat dan membiarkan kami mengkonsumsi waktu panjang untuk penyelesaian karya ini.

Jakarta, awal Januari 2013
Fachry Ali
R. J. Lino

Bab Satu

BUMN, Suatu Keharusan Struktural Politik

BUMN dalam Perekonomian Nasional

Running text TVOne pada pukul 19.00 WIB, Selasa, 5 Juni 2012 menyampaikan berita ringkas: "Pajak BUMN capai Rp135 triliun."[1] Berita ini menarik, karena pada 2010 nada optimisme tentang perkembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah terlihat pada triwulan ke III tahun itu. "Pencapaian laba dan pendapatan usaha BUMN secara rata-rata sudah berada di atas 80%, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan usaha," tulis Buletin BUMN.[2] Optimisme inilah yang mendorong keberanian Kementerian BUMN untuk menyatakan bahwa keuntungan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditargetkan hanya Rp90 triliun.[3] Sementara dividen, yakni keuntungan yang akan diberikan kepada pemerintah "dinaikkan" menjadi Rp30 triliun.[4] Sasaran pendapatan BUMN secara keseluruhan pada tahun itu adalah Rp1.050

---

1 *Running text TVOne*, pukul 19.00 WIB, Selasa, 5 Juni 2012.
2 *Buletin BUMN*, Edisi 44 Tahun IV, 30 November 2010.
3 Harian *Seputar Indonesia*, 13 Januari 2010.
4 Harian *Bisnis Indonesia*, 13 Januari 2010.

triliun.[5] Maka, dengan angka pembayaran pajak yang mencapai Rp135 triliun pada 2012 ini, seperti dinyatakan *running text TVOne* di atas, secara logika pendapatan, keuntungan, dan dividen seluruh BUMN pada 2012 ini menjadi puluhan kali lipat dari apa yang dihasilkan dua tahun sebelumnya. Tentu saja, berapa besar keuntungan dan dividen itu, ketika naskah ini ditulis, belum diketahui.

Data perkembangan di atas hanya contoh untuk memperlihatkan bahwa keberadaan BUMN cukup bermakna secara ekonomis pada tingkat nasional. Dilihat secara individual, misalnya, *capital expenditure* (capex) Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada 2012 ini akan mencapai US$7,6 miliar atau setara dengan Rp69 triliun, kendatipun dengan memanfaatkan berbagai sumber dana yang tersedia.[6] Dalam sebuah pertemuan Komite Kebijakan Publik (KKP) Kementerian BUMN, Deputi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Parikesit menyatakan bahwa capex BUMN-BUMN di bawah kedeputiannya akan mencapai Rp9,91 triliun pada 2014.[7] Di dalam kenyataannya, capex seluruh BUMN pada 2009 mencapai Rp107,2 triliun dan meningkat menjadi Rp190,8 triliun pada 2010. Realisasi capex pada 2009 dan 2010 ini jelas sangat signifikan pengaruhnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tujuan yang sama sepanjang 2009-2010 masing-masing hanya Rp73,4 triliun dan Rp83,2 triliun.[8]

Keberadaan BUMN akan tampak semakin istimewa jika dilihat peran yang dimainkan di dalam pasar modal. Nilai total kapitalisasi pasar 14 BUMN terbuka (Tbk)—tidak termasuk saham Bank BTN, karena belum terhitung Bursa Efek Indonesia (BEI) per Desember 2009—mencapai Rp630,77 triliun akhir 2009. Ini berarti bahwa BUMN telah menyumbangkan sebesar 31,98% dari total kapitalisasi pasar di BEI. Karena pasar modal merupakan sumber pembiayaan al-

---

5 Harian *Media Indonesia*, 13 Januari 2010.
6 *The Jakarta Post*, December 28, 2011, hlm. 13.
7 Laporan Komisi I: Perbankan, Asuransi, dan Jasa Keuangan Kementerian BUMN dalam Rapat Pleno Forum Pertemuan Menteri BUMN, KKP dengan Komisaris Utama, Direktur Utama, dan Sekretaris Perusahaan BUMN: "Setting Ekonomi-Politik BUMN", Gedung PT Telkom, Jakarta, Mei 2010.
8 Rekomendasi KKP Kementerian BUMN kepada Menteri BUMN, Jakarta, 26 Juni 2010, hlm. 5.

ternatif korporasi, maka secara tidak langsung, porsi signifikan nilai kapitalisasi pasar yang diciptakan BUMN tersebut telah menimbulkan pengaruh atas kerja sektor riil di dalam perekonomian nasional.[9] Karena itu tak mengherankan jika secara kumulatif, nilai kekayaan aset seluruh BUMN diperkirakan bisa mencapai Rp11.000.000 triliun pada 2014.[10]

Perdebatan Teoretis-Ideologis Posisi BUMN

Dengan *leverage* ekonomi yang fenomenal ini, keberadaan BUMN mau tidak mau harus ditinjau secara teoretis. Asumsi dasarnya adalah bahwa BUMN adalah perpanjangan tangan negara di dalam perekonomian. Dalam arti kata lain, negara bukan saja tidak absen, melainkan mengambil peran aktif—melalui BUMN-BUMN—sebagai aktor ekonomi. Dalam arti kata lain, keberadaan BUMN telah melahirkan perdebatan teoretis dan "ideologis" yang lebih luas tentang apakah negara harus aktif sebagai aktor ekonomi dan tetap berada "di luar pagar".

Karena itu, sinisme teoretis dan "ideologis" menjadi tidak terhindarkan atas fenomena ini. *The Economist*, sebuah majalah ekonomi (terbit di Inggris sejak 1843) terkemuka taraf dunia dan bahkan mengungguli pangsa pasar dan periklanan majalah *Times* dan *Newsweek* di Amerika Serikat,[11] menyebut fenomena ini sebagai *the rise of state capitalism*. Dengan deskripsi menawan, *The Economist* memulai penjelasan argumentatifnya tentang *state capitalism* ini melalui pertumbuhan gedung-gedung mentereng, besar, dan anggun:

> *Over the past 15 years striking corporate headquarters have transformed the great cities of the emerging world. China Central Television's building resemble a giant alien marching across Beijing's skylines; the 88-storey Petronas Tower, home to Malaysia's oil company, soar above Kuala Lumpur; the gleamy office of VTD, a*

---

9 Rekomendasi KKP, hlm. 5-6.

10 Laporan Komisi Khusus yang disampaikan Mahmudin Yasin dalam Rapat Pleno Pertemuan Menteri BUMN, KKP, Komut, Dirut, dan Sekper: "Setting Ekonomi-Politik".

11 Tom Plate, "The Unnecessary Death of 'Newsweek'", *The Jakarta Post*, Tuesday, October 23, 2012, hlm. 6.

> *banking power house, sits at the heart of Moscow's new financial district. These are all monuments to the rise of a new kind of hybrid corporation, backed by the state but behaving like a private-sector multinational.*

> Selama 15 tahun belakangan ini markas-markas besar korporasi yang mencolok telah mengubah kota-kota besar negara-negara dunia berkembang. Gedung Pusat Televisi Cina yang menyerupai makhluk raksasa asing berbaris di seberang gedung-gedung tinggi Beijing; Menara Petronas berlantai 88, kantor pusat perminyakan Malaysia, menjulang di atas Kuala Lumpur; kantor VTD yang berkilauan, sebuah markas besar perbankan, tegak di jantung wilayah finansial baru Moskow. Semua ini adalah monumen kebangkitan korporasi cangkokan, didukung oleh negara, tetapi bertindak seperti sektor swasta multi-nasional. [12]

Hybrid corporation, backed by the state, dalam perspektif *The Economist*, inilah yang dimaksud dengan BUMN. Sebab, perusahaan itu merupakan hibrida antara dukungan politik (dan karena itu bersifat "non-pasar")[13] dengan unsur korporasi (dan karena itu bersifat pasar). Yang terakhir ini terlihat dan dipertegup melalui penggalan kalimat akhir paragraf terkutip di atas: "*... but be having like a private-sector multinational.*" Maka, dalam kacamata *The Economist*, BUMN bukanlah entitas bisnis sejati, terutama karena ada unsur politik di dalamnya, yakni dukungan negara.

Majalah ekonomi ini memang menganut paham "pasar" dalam pandangan ekonomi. Meneguhkan kembali pandangannya, majalah ini menulis: *"This is, indeed, a theme we have returned to with some frequency since this newspaper was set up in 1843 to oppose Britain's protectionist Corn Laws"* (Memang tema ini harus kami ulang dengan tingkat keacapan tertentu sejak majalah ini didirikan pada 1843 untuk

12 *The Economist*, January 21st 2012, hlm. 11.

13 Frase "non-pasar" (*non-market*), "ekstra-pasar" (*extramarket*), dan "non-ekonomi" (*non-economy*) akan digunakan secara berganti-ganti di dalam naskah ini, tetapi dengan maksud atau arti yang sama: yakni faktor atau kekuatan luar yang mempengaruhi mekanisme atau sistem pasar murni.

menentang *Corn Laws* Inggris yang bersifat proteksionis itu).[14] *Corn Laws*, kita tahu, adalah seperangkat undang-undang untuk melindungi petani Inggris dari persaingan dunia. Mungkin, karena oposisi yang kuat, UU tersebut dicabut pada 1846. Sikap antipati *The Economist* terhadap proteksionisme ekonomi berlanjut hingga kini, dan bahkan tertuju kepada pemerintah Inggris sendiri.

Dalam terbitan bulan Mei 2012, misalnya, *The Economist* menyampaikan kecamannya kepada kebijakan kelistrikan Inggris di bawah David Cameron dengan kalimat: "*The market, not the government, should determine the price of electricity in Britain*" (Pasar, bukan pemerintah, yang harus menentukan harga listrik di Inggris).[15] Kecaman ini dipicu oleh kebijakan pemerintah Inggris yang berusaha mengintervensi pasar energi. Memang, pada 22 Mei 2012, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang kelistrikan baru sebagai akibat, antara lain, meningkatnya harga listrik, dan stagnansi kapasitas instalasi listrik—yang memang harus diganti satu dasawarsa ke depan. Apa yang dilakukan pemerintah Inggris, sebagai tanggapan akan krisis ini, adalah *"(t)o replace a deregulated market with a command-and-control one"* (menggantikan pasar bebas dengan sistem komando). Kebijakan inilah yang mendorong *The Economist* mengecamnya:

> *The certainty is that David Cameron's Conservative-led coalition government is rowing hard against the free-market. This is odd, and wrong.*
>
> (Yang pasti adalah koalisasi pemerintahan yang dipimpin kaum Konservatif David Cameron sedang melawan dengan sengit pasar bebas. Ini aneh dan salah.)[16]

Maka dalam konteks pandangan yang condong kepada mekanisme pasar ini pula *The Economist* melihat posisi dan keberadaan BUMN di negara-negara apa yang disebutnya *emerging markets*. Dalam arti bahwa keberadaan BUMN seharusnya bersifat "sementara", bukan se-

---

14 *The Economist*, December 22nd, 2012, hlm. 11.
15 *The Economist*, May 26th 2012, hlm. 14.
16 *The Economist*, May 26th 2012.